

FORMAT PELAPORAN IKK 2022
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO IKK	URUSAN	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS				BOBOT	KETERANGAN	
2b.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG Belanja Langsung	202,846,271,663	X	100	=	3.73	Belum semua OPD membuat GAP dan GBS sebagai dasar perencanaan namun telah dikirimkan surat edaran Gubernur dan inspektorat telakukan review kepada OPD terkait hal tersebut
				Jumlah Belanja Langsung di Provinsi	5,432,996,328,213					
2b.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi	391	X	10000	=	3.65	Terdapat 3 s/d 4 orang anak dari 1.069.885 anak di Sulteng yang mengalami kekerasan
				Jumlah Seluruh Anak	1069885					
2b.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan dan TPPO	607	X	1E+05	=	40.21	Terdapat 40 s/d 41 orang perempuan dari 1.509.438 perempuan di Sulteng mengalami kekerasan dan TPPO
				Jumlah Seluruh Perempuan	1509438					



DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH DAN BELUM MENYAMPAIKAN GAP DAN GBS

NO	PERANGKAT DAERAH	MENYAMPAIKAN FORMAT		ANGGARAN RESPONSIF GENDER
		SUDAH	BELUM	
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULTENG	S		Rp 9,209,187,008
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. SULTENG	S		Rp 19,165,368,000
3	DINAS KESEHATAN PROV. SULTENG	S		Rp 560,121,700
4	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROV. SULTENG	S		Rp 74,999,075
5	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROV. SULTENG	S		Rp 363,178,000
6	DINAS PERHUBUNGAN PROV. SULTENG	S		Rp 200,000,000
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SULTENG		B	
8	DINAS SOSIAL PROV. SULTENG	S		Rp 2,210,000,000
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. SULTENG	S		Rp 19,377,499,736
10	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. SULTENG	S		Rp 1,119,545,575
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SULTENG	S		Rp 496,355,000
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SULTENG	S		Rp 107,034,525
13	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV. SULTENG	S		
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. SULTENG	S		Rp 292,048,475
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULTENG	S		Rp 2,120,000,000
16	DINAS PARIWISATA PROV. SULTENG	S		Rp 223,201,300
17	DINAS PANGAN PROV. SULTENG	S		Rp 346,738,375
18	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. SULTENG	S		Rp 29,635,499,840
19	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG	S		Rp 6,749,250,500
20	DINAS PERTANIAN PROV. SULTENG		B	
21	DINAS KEHUTANAN PROV. SULTENG	S		Rp 562,614,000
22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTENG	S		Rp 20,618,000
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULTENG	S		Rp 94,959,950
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROV. SULTENG	S		Rp 600,038,558
25	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULTENG		B	
26	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SULTENG	S		Rp 182,744,825
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. SULTENG	S		Rp 100,000,025
28	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. SULTENG	S		Rp 116,624,950
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULTENG	S		Rp 68,409,800
30	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV SULTENG			
31	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV. SULTENG			
32	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. SULTENG			
33	BIRO ORGANISASI SETDA PROV SULTENG			
34	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. SULTENG	S		Rp 104,752,000
35	BIRO UMUM SETDA PROV. SULTENG	S		Rp 90,000,000
36	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULTENG	S		Rp 37,692,000
37	BIRO HUKUM SETDA PROV. SULTENG	S		Rp 90,000,000
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROV. SULTENG	S		Rp 161,943,500
39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROV. SULTENG	S		Rp 77,806,700
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULTENG	S		Rp 209,268,000
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULTENG		B	
42	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI DAERAH PROV. SULTENG	S		Rp 449,999,850
43	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. SULTENG		B	
44	SEKRETARIAT DPRD PROV. SULTENG	S		Rp 2,684,772,446
45	SATLJAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULTENG		B	
46	SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULTENG	S		Rp 59,999,950
47	RSUD UNDATA		B	
	RSUD MADANI	S		Rp 104,884,000,000
	TOTAL			Rp 202,846,271,663

No	BELANJA	ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	5.432.996.328.213
1.	BELANJA OPERASI	4.046.809.413.010
-	Belanja Pegawai	1.595.332.147.004
-	Belanja Barang dan Jasa	1.769.197.651.376
-	Belanja Hibah	638.434.091.005
-	Belanja Bantuan Sosial	43.845.523.625
2.	BELANJA MODAL	746.159.330.088
-	Belanja Modal Tanah	337.500.000
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.788.297.067
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	235.211.270.245
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	255.985.531.234
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.836.731.542
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.538.882.178
-	Belanja Tidak Terduga	9.538.882.178
4.	BELANJA TRANSFER	630.488.702.937
-	Belanja Bagi Hasil	600.326.909.596
-	Belanja Bantuan Keuangan	30.161.793.341

NO		IKK OUTPUT	IKK	RUMUS	BOBOT
1	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG / 40 lembaga dari 45 lembaga	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD 2.938.539.956 ----- x 100% 4.669.877.792.403,00 Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi	0.06%
2	2	Jumlah program/kegiatan PUG pada peringkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender ditingkat provinsi / 31 OPD			
3	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi (DP3A) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak / 4 media	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi 313 ----- x 10.000 1.069.885 Jumlah seluruh Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	2.93
	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki layanan standar layanan minimal/13 kab/kota			
	3	Persentase korban kekerasan yang terlayani / 76,74 %			
	4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan / 1 kab/kota			
	5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah provinsi (APBD) provinsi / 1 Kab.kota			
3	1	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi / 1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 501 ----- x 100.000 1.451.026 Jumlah penduduk perempuan	34.53
	2	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi / 1			
	3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani / 78,64%			
	4	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan / 1			
	5	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah provinsi (APBD) provinsi /1			

Palu, 11 Agustus 2022

an. Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Sekretaris

